



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

LAPORAN TAHUNAN

Pelayanan Informasi Publik

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VII BANJARMASIN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2024

Motto Layanan Informasi Publik

*"Gesit, Ramah, Amanah, Terpercaya,
Impresif, Senyum"*

Maklumat Layanan Informasi Publik

"Menyediakan Informasi Publik dengan Cepat, Mudah dan Sederhana sesuai Standar Pelayanan Informasi Publik serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara Transparan dan Bertanggung Jawab."

Visi :

"Mewujudkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin yang Gesit, Ramah, Amanah, Terpercaya, Impresif dan penuh Senyum."

Misi :

1. Menyediakan Informasi Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyediakan Sarana Pengelolaan Pelayanan yang Baik, Efektif dan Efisien;
3. Melayani Pemohon Informasi secara Cepat, Transparan dan Bertanggung Jawab.

BPSPDM
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Laporan ini merupakan kewajiban badan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang mengatur kewajiban Pelaksana PPID untuk membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Hadirnya Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Disamping itu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin berkewajiban untuk menyediakan layanan informasi publik terkait penyelenggaraan kegiatan di wilayahnya. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, namun diharapkan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan komitmen seluruh jajaran kami untuk terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pada tiap kegiatan serta kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan sehingga penyusunan laporan ini dapat terlaksana dengan lancar. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan banyak perbaikan di berbagai aspek, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya pelayanan informasi yang lebih baik di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin.

Banjarmasin, 09 Januari 2025
Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VII Banjarmasin
Djadjat Djatnika, S.E., M.M.
NIP. 197512232007011003
Ditandatangani Secara Elektronik



LAPORAN PPID TAHUNAN T.A 202



Pengecekan Keaslian Dokumen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Kebijakan Internal terkait dengan Implementasi UU KIP	4
B. Kegiatan Internal terkait dengan Implementasi UU KIP	5
1. Multimedia sebagai sarana penyebarluasan Informasi	5
2. Sarana Pelayanan Informasi Lainnya	7
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.....	7
C. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	8
D. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik	9
E. Rekapitulasi Pelatihan Tahun 2024	12
F. Kondisi Layanan Informasi Publik	15
1. Sarana dan Prasarana.....	15
2. SDM dan Struktur Organisasi	16
G. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik	17
H. Survey Layanan Informasi Publik.....	18
BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	19
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Rekomendasi.....	20
B. Tindak Lanjut.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN / APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan, dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, yang merupakan upaya strategis

mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin sebagai Instansi Penyelenggara Pelatihan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusianya berkomitmen untuk turut serta mendukung keterbukaan informasi publik melalui implementasi UU KIP.

Kementerian PU menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta tentang daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Kementerian PU juga daftar informasi yang dikecualikan (informasi rahasia).

Implementasi UU KIP tersebut telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) PPID sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin 32/KPTS/Mr/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Nomor 12/KPTS/Mr/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Tahun Anggaran 2024



Alamat Desk Layanan PPID:

Lobby Lt. Dasar

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin

Jalan Raya Beruntung Jaya No.09, Banjarmasin 70248

Telp. 0511 – 3255975/3268060, Fax: 0511 – 3261750

Email: bapekom7banjarmasin@pu.go.id

Instagram: @pupr_bpsdm_bapekom7

Website: <https://bpsdm.pu.go.id/>

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Tahunan PPID ini adalah sebagai Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Tahun 2024 dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID ini sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Untuk penyusunan laporan Badan Publik tersebut, Pelaksana PPID Pusat dan Daerah (salah satunya Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin) mempunyai tugas untuk membuat dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Utama.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Tahunan PPID Daerah ini adalah untuk melaporkan kepada PPID Utama tentang upaya-upaya dan perbaikan pelayanan serta pengelolaan informasi publik yang telah dilakukan dalam rangka implementasi UU KIP di lingkungan Kementerian PU selama periode 2024.



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan Internal terkait dengan Implementasi UU KIP

UNIT ESELON III	Surat Keputusan/Kebijakan Terkait
Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin, Nomor 32/KPTS/Mr/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Nomor 12/KPTS/Mr/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Tahun Anggaran 2024
Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin, Nomor 28/KPTS/Mr/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Nomor 08/KPTS/Mr/2024 tentang Penetapan Pengelola E-Monitoring di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Tahun Anggaran 2024
	Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin, Nomor 27/KPTS/Mr/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Nomor 06/KPTS/Mr/2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Website di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin Tahun Anggaran 2024

Kegiatan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin, rujukannya bersumber dari Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

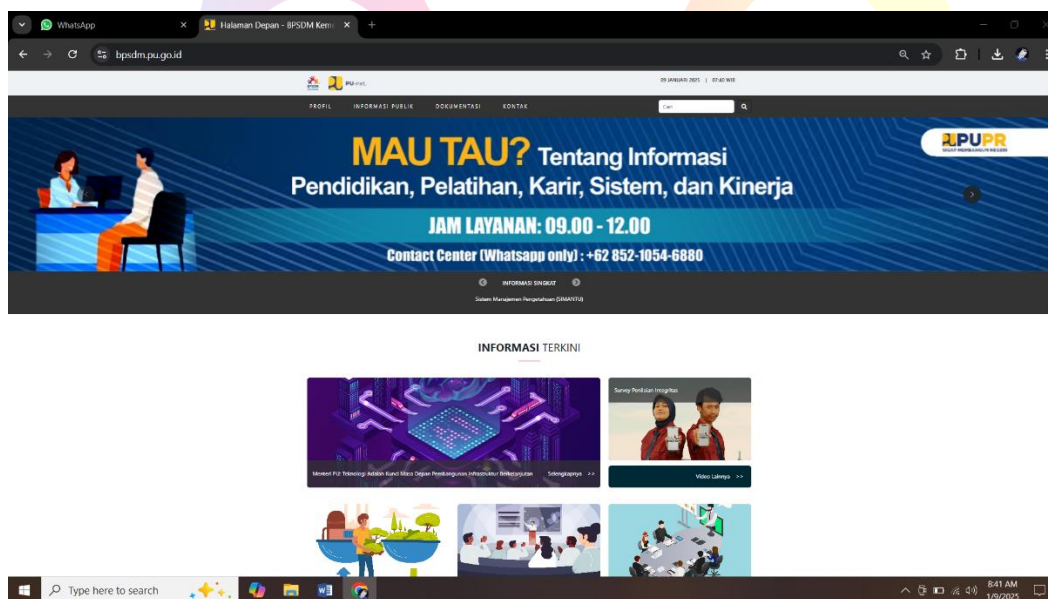
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik;

B. Kegiatan Internal terkait dengan Implementasi UU KIP

1. Multimedia sebagai sarana penyebarluasan Informasi

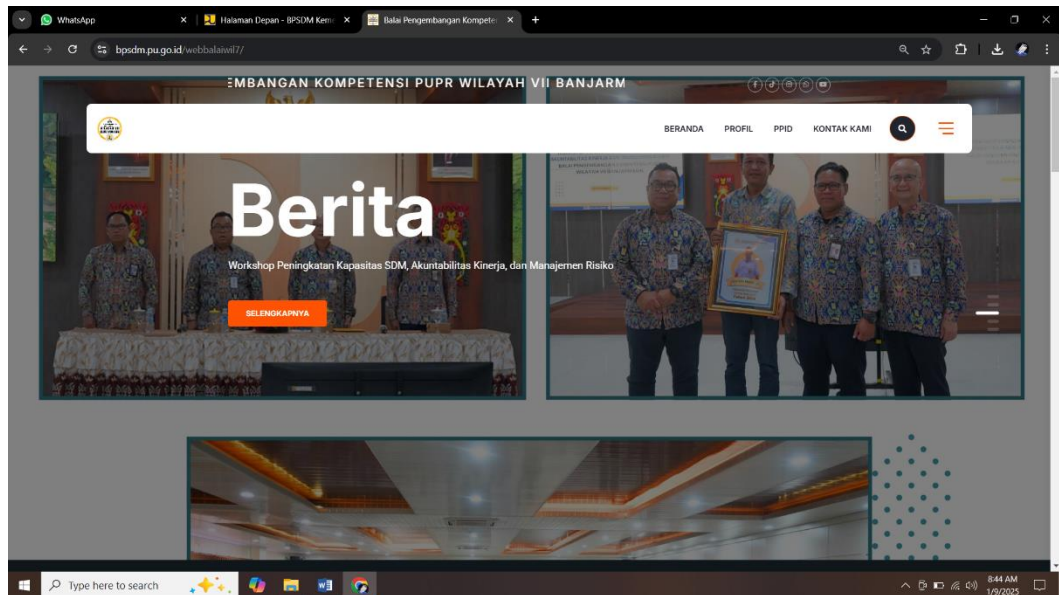
Di jaman dahulu cara manusia menyebarkan informasi sangat beragam namun masih sangat lambat dan tradisional. Namun kini kemajuan teknologi yang sangat cepat mendorong semua aspek untuk berkembang ke arah yang lebih praktis. Bisa kita lihat pada sistem penyebaran informasi mulai dari teknologi telepon, radio, televisi, sampai ke era digital yaitu internet.

Website Layanan Informasi BPSDM



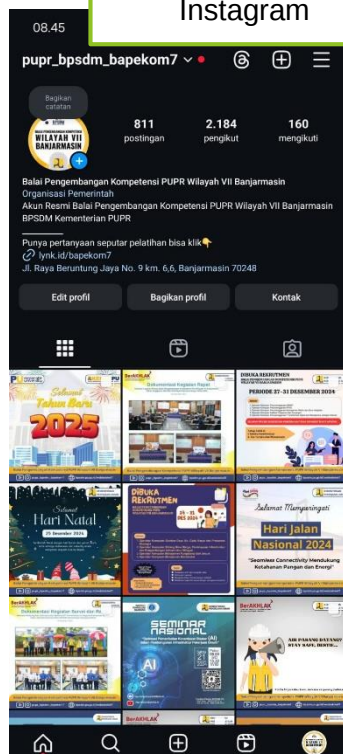
Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara *mobile*.

Website Profil Unit Kerja/Unit Organisasi

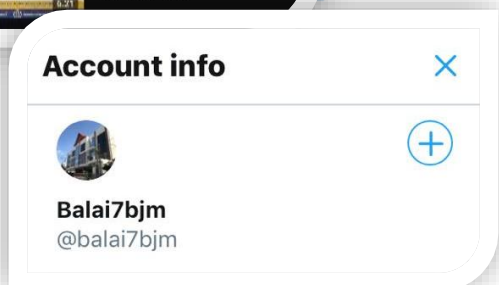
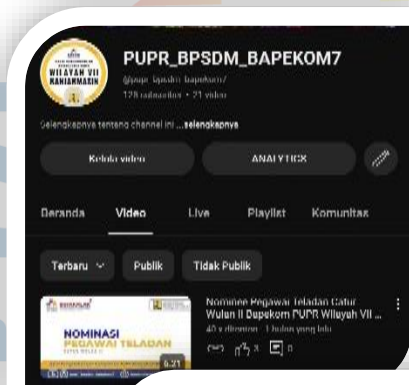


Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 137 Tahun 2018 Tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.

Instagram



Youtube Channel dan Twitter



Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual.

2. Sarana Pelayanan Informasi Lainnya

Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin berupaya terus untuk meningkatkan program Pengembangan Kompetensi sebagai upaya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Dalam agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

No	Nama Diklat	Jenis Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi	Balai Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Status Pelaksanaan	Akhir	Jumlah Peserta
19	Manajemen Risiko Infrastruktur - A	Non-Sertifikasi	-	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	05 Mar - 12 Mar 2025	Selesai	-	-
34	Fungsional Peraga Kelola Jalan dan Perbaikan AMI Pertama (Fungsional Teknik Jalan dan Perbaikan AMI Pertama) - A	Non-Sertifikasi	-	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	28 Apr - 26 May 2025	Selesai	-	-
36	Peningkatan Manajemen Risiko - A	Non-Sertifikasi	-	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	05 May - 09 May 2025	Selesai	-	-
41	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi - A	Non-Sertifikasi	-	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	05 May - 14 May 2025	Selesai	-	-
43	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan - A	Non-Sertifikasi	-	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	05 May - 22 Jul 2025	Selesai	-	-
46	Sistem Akuntansi Instansi - A	Non-Sertifikasi	-	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	19 May - 28 May 2025	Selesai	-	-
60	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Sertifikasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi atau Ahli Muda K2 Konstruksi - A	Sertifikasi	LSP K3 Konstruksi	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	09 Jun - 10 Jun 2025	Selesai	-	-
70	Peningkatan Kapasitas PUPR dengan Metode Bina Bangun Informasi Modeling (BBIM) - A	Non-Sertifikasi	-	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	03 Jul - 11 Jul 2025	Selesai	-	-
89	Mata Latihan Sertifikasi Umum Pura Mawu - A	Non-Sertifikasi	-	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	04 Aug - 04 Sep 2025	Selesai	-	-
92	Pengembangan Rancangan Pemerintah Level - 1	Sertifikasi	LUPP	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan	11 Aug - 29 Aug	Selesai	-	-

Kalender Pengembangan Kompetensi yang diterbitkan BPSDM setiap tahunnya bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan oleh BPSDM, salah satunya adalah oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

C. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksanaan Daerah Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin yang berlangsung selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Triwulan I (Januari s.d Maret 2024)

Datang langsung

No	Asal/Instansi	Jumlah Orang	Tanggal	Keperluan
1	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	1	2 Januari 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek
2	Dinas PUPR Kabupaten Seruyan	1	22 Januari 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek
3	Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	4	29 Februari 2024	Koordinasi Program Kerja TA 2024 Bidang Konstruksi
4	Dinas PUPR Kabupaten Seruyan	2	21 Maret 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek

Triwulan II (April s.d Juni 2024)

Datang langsung

No	Asal/Instansi	Jumlah Orang	Tanggal	Keperluan
1	Dinas PUPR Prov Kalsel	5	17 April 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek
2	BWS Kalimantan III	1	29 April 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek
3	Dinas PUPR Prov Kalsel	3	06 Mei 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek
4	Dinas PUPR Prov Kaltim	2	08 Mei 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek
5	Dinas PUPR Kabupaten Barito Timur	2	30 Mei 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek
6	Dinas PUPR Prov Kaltim	1	06 Juni 2024	koordinasi terkait kerjasama pelatihan SDM dilingkungan Prov. kaltim
7	Dinas PUPR Kabupaten Banjar	1	10 Juni 2024	Konsultasi tentang Jafung Jasa Konstruksi

Triwulan III (Juli s.d September 2024)

Datang langsung

No	Asal/Instansi	Jumlah Orang	Tanggal	Keperluan
1	Dinas PUPR Kabupaten Batola	1	27 September 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek

Triwulan IV (Oktober s.d Desember 2024)

Datang langsung

No	Asal/Instansi	Jumlah Orang	Tanggal	Keperluan
1	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	1	08 November 2024	Berdiskusi mengenai permohonan Narasumber pelatihan
2	Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru	1	28 November 2024	Koordinasi Kegiatan Bimtek
3	BPSDM Prov Kalteng	2	03 Desember 2024	Koordinasi terkait persiapan pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis PUPR tahun 2025

Media Sosial

No	Akun Medsos	Tanggal	Keperluan
1	Rafida M. W.	07 Oktober 2024	Informasi Pelaksanaan Pelatihan Bidang SDA

D. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

No	Bulan	Uraian Informasi	Klasifikasi			Jumlah	Keterangan
			Berkala	Setiap Saat	Serta Merta		
1	Januari	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		0	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	1	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	0	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
2	Februari	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		3	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	1	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	0	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi
3	Maret	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		0	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik

No	Bulan	Uraian Informasi	Klasifikasi			Jumlah	Keterangan
			Berkala	Setiap Saat	Serta Merta		
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	1	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	0	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi
4	April	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		1	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	1	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	0	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
5	Mei	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		0	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	2	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	2	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi
6	Juni	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		0	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	1	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	0	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi
7	Juli	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		0	Masih belum ada informasi mengenai jadwal pelaksanaan pelatihan yang diupload pada media informasi
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	2	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik

No	Bulan	Uraian Informasi	Klasifikasi			Jumlah	Keterangan
			Berkala	Setiap Saat	Serta Merta		
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	1	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi
8	Agustus	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		0	Masih belum ada informasi mengenai jadwal pelaksanaan pelatihan yang diupload pada media informasi
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	2	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	0	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi
9	September	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		1	Masih belum ada informasi mengenai jadwal pelaksanaan pelatihan yang diupload pada media informasi
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	2	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	0	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi
10	Oktober	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		0	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	2	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	1	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi
11	November	Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		2	Masih belum ada informasi mengenai jadwal pelaksanaan pelatihan yang diupload pada media informasi

No	Bulan	Uraian Informasi	Klasifikasi			Jumlah	Keterangan
			Berkala	Setiap Saat	Serta Merta		
12	Desember	Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	2	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	5	Dipublikasikan di Media Informasi Elektronik
		Informasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan		V		0	Masih belum ada informasi mengenai jadwal pelaksanaan pelatihan yang diupload pada media informasi
		Informasi mengenai Kegiatan Pelatihan yang sedang berlangsung	V		V	0	masih belum ada informasi mengenai kegiatan pelaksanaan pelatihan yang diupload pada media informasi
		Informasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	V		V	0	Masih belum ada hasil monev kegiatan pelatihan yang diupload pada media informasi

E. Rekapitulasi Pelatihan Tahun 2024

No	Nama Pelatihan	Sub Bidang	Tanggal Pelaksanaan
1	Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola Keuangan Satuan Kerja Bapekom PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Manajemen Umum	15 Februari 2024
2	Jabatan Fungsional Pengangkatan Pertama Teknik Pengairan (E-Learning)	Manajemen Fungsional	19 Februari 2024
3	Penyelenggaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM)	Konstruksi	22 Februari 2024
4	Webinar Penerapan Bangunan Gedung Cerdas dalam Perwujudan Smart City di IKN	Permukiman	28 Februari 2024

No	Nama Pelatihan	Sub Bidang	Tanggal Pelaksanaan
5	Tata Persuratan dan Kearsipan	Manajemen Umum	18 Maret 2024
6	Preservasi Jembatan	Jalan dan Jembatan	18 Maret 2024
7	Pendampingan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya	Perumahan	22 April 2024
8	Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Permukiman	22 April 2024
9	Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah	Manajemen Fungsional	23 April 2024
10	Manajemen Pengembangan SDM	Manajemen Umum	13 Mei 2024
11	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Manajemen Konstruksi	14 Mei 2024
12	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Perumahan	PIW	27 Mei 2024
13	Pendampingan Penyusunan DED SPALD-T Skala Perkotaan	Permukiman	10 Juni 2024
14	Operasi dan Pemeliharaan Rawa (Blended Learning)	Sumber Daya Air	20 Juni 2024
15	Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Jalan dan Jembatan	Jalan dan Jembatan	24 Juni 2024

No	Nama Pelatihan	Sub Bidang	Tanggal Pelaksanaan
16	Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Manajemen Konstruksi	23 Juli 2024
17	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi	Manajemen Konstruksi	05 Agustus 2024
18	Penanganan Tanah Problematis Pada Struktur Jalan	Jalan dan Jembatan	06 Agustus 2024
19	Hukum Kontrak Kerja Konstruksi	Manajemen Konstruksi	02 September 2024
20	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	Manajemen Konstruksi	09 September 2024
21	Estimasi Biaya Konstruksi	Manajemen Konstruksi	09 September 2024
22	Perencanaan Teknis Air Baku (Distance Learning)	Sumber Daya Air	23 September 2024
23	Workshop ISO 9001 (QMS) dan ISO 37001 (ABMS)	Manajemen Umum	25 September 2024
23	Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus Bina Marga terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Bidang Jalan dan Jembatan	Manajemen Konstruksi	01 Oktober 2024
25	Pengelolaan Banjir Terpadu (Blended Learning)	Sumber Daya Air	07 Oktober 2024
26	Manajemen Konstruksi	Manajemen Konstruksi	14 Oktober 2024
27	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Sertifikasi Ahli Madya Keselamatan Konstruksi	Manajemen Konstruksi	04 November 2024

No	Nama Pelatihan	Sub Bidang	Tanggal Pelaksanaan
28	Webinar Society 5.0 (Teknologi Lawan atau Kawan)	Manajemen Umum	18 November 2024
29	Workshop Peningkatan Kapasitas SDM, Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Risiko	Manajemen Umum	20 November 2024
30	In house Training Core Values BerAKHLAK : Penguatan Perilaku Berintegritas dan Disiplin serta Perilaku Harmonis di lingkungan Bapekom PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Manajemen Umum	21 November 2024
31	In house Training: Fotografi Tingkat Dasar	Manajemen Umum	31 Desember 2024

F. Kondisi Layanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi/ruang PPID informasi.



Prasarana:

1. Ruang Sekertariat PPID
2. Ruang Desk Layanan Informasi/Front Office

Sarana:

1. Meja dan Kursi Informasi Publik
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Wireless Fidelity (Wifi)
4. Buku Referensi
5. Buku Tamu
6. Formulir-formulir
7. Papan Tulis
8. ATK
9. Lemari Arsip
10. Printer
11. Telepon

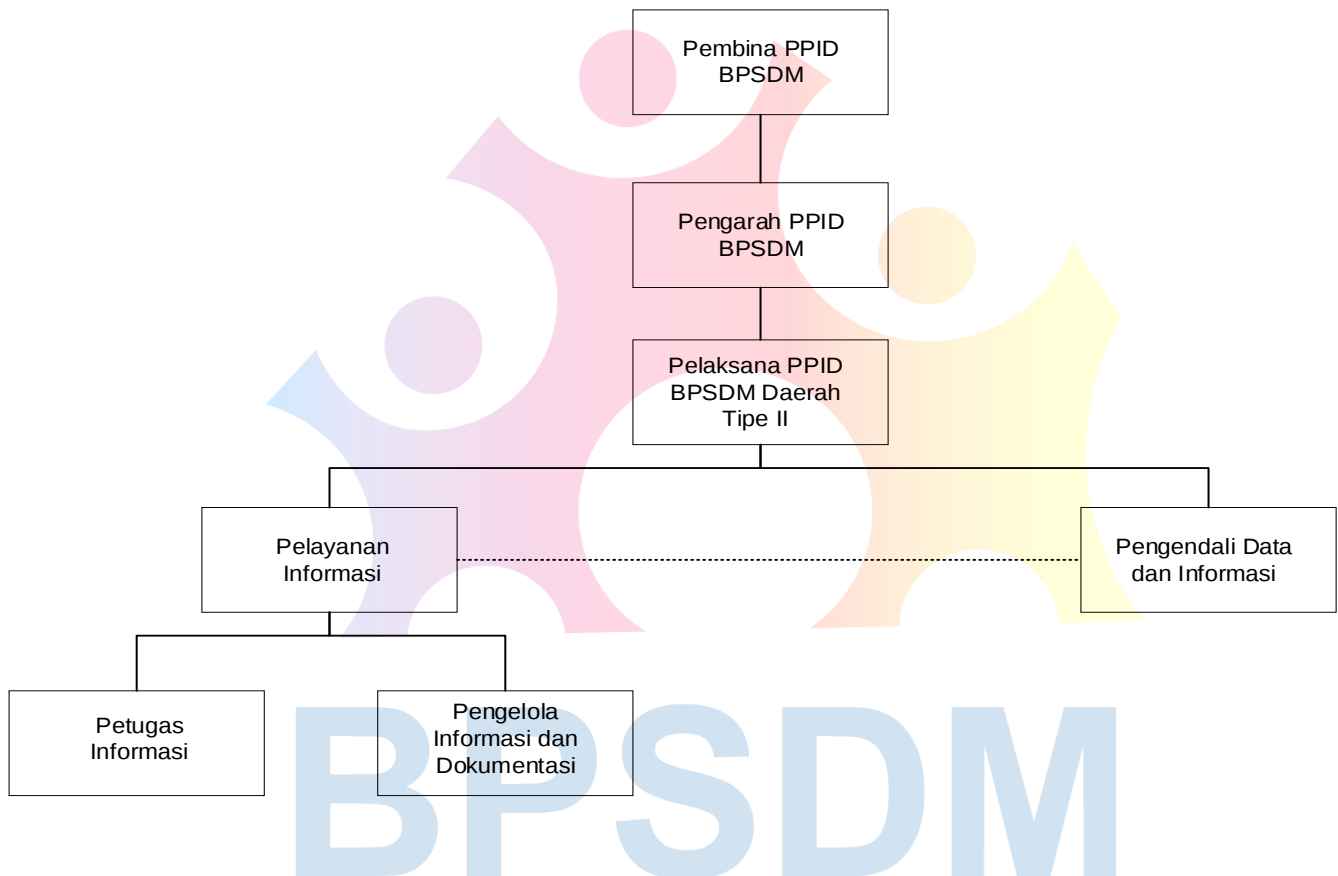
2. SDM dan Struktur Organisasi

- Sumber Daya Manusia (SDM):

NO.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DJADJAT DJATNIKA, S.E., M.M.	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Pelaksana PPID Daerah
2.	DEWI RAMADHIANI, S.Psi.	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Petugas Layanan Informasi PPID Daerah
3.	EKO NUR HAPSORO, S. I.P., M.T.	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Petugas Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
4.	TETTY ROSNAULI SIBURIAN, S.E.	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Petugas Layanan Informasi PPID Daerah
5.	ABDUL MUN IEM	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Petugas Layanan Informasi PPID Daerah
6.	HELIYATI, S.E.	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Petugas Layanan Informasi PPID Daerah

7.	KUSWORO, A.Md.	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Petugas Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
8.	MULKANI	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin	Petugas Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah

- Struktur Organisasi:



G. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Beberapa upaya yang dilakukan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin untuk meningkatkan mutu layanan informasi publik yaitu:

1. Publikasi kegiatan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin melalui konten-konten yang menarik di Media Sosial
2. Pada bulan Desember *launching* KLOP pada PU *Corporate University* yang hadir untuk mempermudah akses layanan teknologi informasi bagi seluruh ASN kementerian PU.

H. Survey Layanan Informasi Publik

Survey yang dilakukan PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin menggunakan aplikasi Sibangkoman yang dapat diisi setelah melaksanakan pelatihan selesai. Evaluasi mencakup manajemen penyelenggaraan, materi pelatihan, pengajar serta saran.



BPSDM

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin terutama untuk akses informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi. Kami masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan informasi sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mengolah informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di media informasi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



BPSDM

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekomendasi

- Menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, atau pelatihan terkait tata cara pelayanan informasi untuk seluruh pegawai Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin;
- Meningkatkan Koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
- Mengadakan pelatihan PPID internal bagi seluruh Satgas PPID di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin.
- Mengoptimalkan layanan informasi publik melalui website dan sosial media.
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dirasa belum optimal dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

B. Tindak Lanjut

- Mengikutkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan media sosial badan publik;

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin.

BPSDM
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia